

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab besar agar dalam pelaksanaannya dapat mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah daerah ini menggambarkan keluaran atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran keuangan selama satu periode tertentu.

Kasus mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sangat menarik untuk kaji lebih lanjut. Hal ini karena banyaknya laporan keuangan pemerintah yang disajikan tidak sesuai. BPK juga telah berhasil menemukan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Berikut merupakan contoh kasus nyata pada laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang telah disajikan.

BPK temukan kerugian Pengelolaan Uang Negara Rp.1,9 Triliun. Dari ketidakpatuhan, total permasalahan berdampak finansial mencapai Rp. 30,6 triliun yang terdiri dari Rp. 1,92 triliun kerugian negara dan Rp. 1,67 triliun potensi kerugian negara. Ketidakpatuhan pengelolaan keuangan tersebut terutama terjadi di daerah. Kepala BPK Harry Azhar Aziz memaparkan, kerugian negara terbesar

berasal dari pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Nilai kerugiannya mencapai Rp. 1,2 triliun. Dari ketidakpatuhan itu berasal dari 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan dari total 696 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemerintah. Harry merinci, 49 persen permasalahan dari 10.918 temuan tersebut akibat kelemahan sistem pengendalian. Sedangkan 51 persen permasalahan berasal dari ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dengan total nilai mencapai Rp. 44,6 triliun. Adapun sejak periode 2003 sampai semester I 2016, BPK telah menyampaikan temuan yang terindikasi berunsur pidana sebanyak 231 surat yang berisi 446 temuan pemeriksaan senilai Rp. 44,6 triliun. Pemerintah dalam hal ini menindaklanjuti 94% diantaranya dengan nominal Rp. 42,3 triliun. (Sumber : www.katadata.co.id - 4 Oktober 2016).

Banyak berbagai pihak menginginkan informasi laporan keuangan dipublikasikan oleh pihak pemerintah daerah. Sehingga, informasi dari laporan keuangan haruslah memiliki akuntabilitas. Dengan adanya akuntabilitas tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai informasi agar informasi yang disajikan memiliki nilai (Suwardjono, 2005)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 telah mengatur karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan akan menentukan nilai dari informasi laporan keuangan tersebut. terdapat empat karakteristik agar laporan keuangan dapat sesuai dengan kualitas yang baik. Empat karakteristik tersebut yaitu: a) Relevan, b) andal, c) dapat dibandingkan, dan d) dapat dipahami.

Untuk memperoleh laporan keuangan yang memiliki nilai informasi terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi. Hasil-hasil penelitian tersebut tidak sama. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu mengenai nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, yaitu :

Pengawasan pada dasarnya digunakan untuk menghindari kemungkinan adanya penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dari hasil penelitian Husna (2013) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hal tersebut mengungkapkan bahwa dengan pengawasan dapat membantu dalam mencapai suatu tujuan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga pengawasan dapat menentukan nilai informasinya. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Pratiwi, dkk (2015), Fernanda (2014), dan Armando (2013) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi. Namun penelitian Arfianti (2011) menunjukkan temuan yang berbeda dimana hasil penelitiannya membuktikan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan dan keandalan pelaporan keuangan pemerintah yang artinya pada keandalan, Pengawasan dilakukan dengan menyelenggarakan tugas dan fungsi agar menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dan fungsi pengawasan sendiri untuk mengoreksi apabila ditemukan adanya penyimpangan

atau kekeliruan agar segera dapat diatasi, tapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan.

Human capital yang meliputi pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan seseorang dapat digunakan sebagai modal untuk memberikan pelayanan yang profesional. Maka pemerintah daerah memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten supaya menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Dalam penelitian Zuliarti (2012) menyatakan kompetensi sumber daya manusia terhadap informasi pelaporan keuangan berpengaruh positif tidak signifikan. Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arfianti (2011) dan Husna (2013). Dari hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sedikitnya pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi, otorisasi pemisahan tugas yang belum jelas, dan kurangnya pelaksanaan pelatihan agar fungsi akuntansi dapat berjalan dengan baik. Namun hasil tersebut tidak sama dengan Pramudiarta (2015), Pratiwi dkk (2015), Ariesta (2013), Sonia (2016), dan Sumarni (2016) yang menyimpulkan kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Dengan adanya pemanfaatan teknologi memiliki banyak manfaat, antara lain dapat menyiapkan, menghitung dan memproses transaksi secara cepat dan akurat, dapat melakukan penyimpanan data dalam jumlah yang besar, serta memiliki kemampuan *multiprocessing* (Wahana komputer, 2003). Hal ini agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Penelitian Zuliarti (2012) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil

penelitian ini mendukung dengan penelitian Pratiwi dkk (2015), Ariesta (2013), Fernanda (2014), dan Sonia (2016). Namun, hasil penelitian tersebut tidak sama dengan Pramudiarta (2015), dan Arfianti (2011) yang menghasilkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif tidak signifikan. Dalam ketidak signifikanan ini dikarenakan teknologi informasi belum atau tidak dimanfaatkan secara optimal, penerapan teknologi informasi membutuhkan biaya yang besar, sehingga penerapan teknologi informasi ini menjadi sia-sia karena tidak dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal.

Dari berbagai penelitian diatas yang memunculkan beragam hasil penelitian mendorong peneliti untuk mereplikasi penelitian sejenis mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Replikasi penelitian ini menggunakan jurnal acuan dari penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dkk (2015). Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan periode penelitian dan objek pada SKPD di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Kendal.

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan pemerintah merupakan laporan yang penting untuk dapat menilai kinerja dari suatu pemerintahan, oleh karena itu laporan keuangan

yang memiliki nilai informasi dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pengawasan Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Akuntansi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Apa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan ?
2. Apa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan ?
3. Apa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akan menjadi tambahan pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi.

2. Bagi pemerintah daerah

Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang bernilai.